

Pelunasan utang pajak berkaitan dengan pemberesan harta pailit :
analisa Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 = Tax debt
repayment related to bankruptcy property settlement : analysis
Jurisprudence Number 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Juventia Aurellia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20455642&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pembagian harta pailit milik debitor pailit yang dilakukan oleh kurator harus dilakukan dengan menimbang kedudukan kreditor pailit. Kedudukan kreditor ini dapat menjadikan seorang kreditor memiliki hak untuk didahulukan atas pembayaran utang oleh debitor dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor preferen sebagai kreditor dengan hak istimewa berada diatas kreditor separatis dan konkuren. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan pemberesan harta pailit PT. Industries Badja Garuda (dalam pailit). Utang pajak milik debitor pailit diklasifikasikan menjadi utang pajak yang bersifat preferen dan utang pajak yang bersifat konkuren. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana kedudukan utang pajak dalam pemberesan harta pailit dan bagaimana penyelesaian utang pajak dalam pemberesan harta pailit PT Industries Badja Garuda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan utang pajak dalam kepailitan menjadi pihak yang didahulukan pelunasannya daripada kreditor lainnya. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang. Meskipun utang pajak sebagai kreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan, kreditor separatis pemegang jaminan tetap memiliki hak atas jaminan yang dimilikinya. Pelunasan utang pajak dalam kasus ini harus memperhatikan ketentuan mengenai daluwarsa utang pajak. Untuk mencegah tidak dilunasinya utang pajak oleh wajib pajak maka seharusnya kantor pajak bertindak lebih tegas agar tagihan pajak yang tidak terbayar tidak menumpuk.

ABSTRACT

The settlement of bankruptcy property of debtor, which is conducted by the curator in charge, must be done by considering the position of their creditors. The position of creditors can make some creditor have preference rights for the debt payment compared to other creditors. Creditor with preference rights must get the debt repayment first compared to the other creditors. But this regulation is not applied in tax debt repayment related to bankruptcy property settlement in PT. Industries Badja Garuda (in Bankrupt process). Tax debt in this case, gets classified into tax debt with preference rights and tax debt with concurrent rights.

The main issues in this study are how the position of tax debt in bankruptcy property settlement and how the settlement of tax debt in bankruptcy property settlement PT Industries Badja Garuda? This study uses juridical normative with prescriptive research. This study uses secondary data. From the research can be concluded that the position of tax debt repayment in bankruptcy becomes the priority creditors in the bankruptcy property settlement compared to the other creditors. This is stated in the constitution. Even though tax debt as creditor gets the preference right by the law, creditor with separatist rights still have the right to claim their debt guarantee. Tax debt repayment in this case should considering the expiration clause in taxation. To prevent the taxpayer neglecting their duty, tax office in charge should act more assertive so the tax debt will not accumulate